



# POLITICOS:

## Jurnal Politik dan Pemerintahan

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/politicos/index>

## Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibusah Kota

*Fani Kharismania\* dan Evi Priyanti*

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

\*Email: [fanikharisma25@gmail.com](mailto:fanikharisma25@gmail.com)

**How to Cite:** Kharismania, F., & Priyanti, E. (2023). Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Cibusah Kota. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 3 (2): 144-159. Doi: <https://doi.org/10.22225/politicos.3.2.2023.144-159>

### Abstract

The purpose of this research is to find out the role of the community in infrastructure development in Cibusah Kota Village, Bekasi Regency, West Java Province. Because in practice, the development process that involves the community mostly has obstacles originating from the participation of the community itself or the performance of the apparatus in coordinating development plans. This research is a type of descriptive qualitative research using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation and data analysis techniques through the process of data reduction, data presentation and ends with drawing conclusions after the data is collected. The results obtained from this study are the involvement of the Cibusah Kota Village community in terms of development, especially the development of village infrastructure, which has played an active role in every stage of its implementation, although overall there are still several obstacles such as differences in perspectives and mindsets between indigenous people and the community. newcomers when conveying aspirations at the assessment stage. But apart from the existing constraints, the cooperation between village officials and the community is well established and harmonious because the shared vision creates positive feedback, although it is still at a low level of sustainability.

**Keywords:** Infrastructure development; Society participation; apparatus performance; cooperation; cibusah kota village.

### Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui peran masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Karena pada pelaksanaannya, proses pembangunan yang melibatkan masyarakat sebagian besar memiliki kendala yang berasal dari keikutsertaan masyarakat itu sendiri atau kinerja aparatur dalam mengkoordinir rencana pembangunan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara serta dokumentasi dan teknik analisis data melalui proses reduksi data, penyajian

data serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan setelah data terkumpul. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat Desa Cibirusah Kota dalam hal pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur desa sudah cukup berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaannya, walaupun secara keseluruhan masih terdapat beberapa kendala seperti pada perbedaan sudut pandang dan pola pikir antara warga pribumi dengan masyarakat pendatang saat penyampaian aspirasi pada tahap assesment. Namun di luar kendala yang ada, kerja sama antara perangkat desa dengan masyarakat sudah cukup terjalin dengan baik dan harmonis karena kesamaan visi yang dituju menciptakan umpan balik yang positif walaupun masih dalam tingkat keberlanjutan yang rendah.

**Kata kunci:** Pembangunan infrastruktur; partisipasi masyarakat; kinerja aparatur; kerja sama; desa cibirusah kota.

## I. PENDAHULUAN

Menurut catatan sejarah, penyelenggaraan pembangunan desa di Indonesia ternyata masih menunjukkan kuatnya pengaruh sentralisasi yang sulit dihindari dalam proses pelaksanaan pembangunan desa (Nain, 2019). Hal ini dikarenakan fungsi negara atau pemerintah sebagai pihak penyedia sumber daya yang mendukung proses pembangunan masih terlihat dominan, apabila dibandingkan dengan sumber daya yang berasal dari masyarakat desa itu sendiri. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, pembangunan desa telah dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah pusat dan proses pembangunan desa dari waktu ke waktu sering kali menghadapi perubahan strategi. Perubahan strategi tersebut dimaksudkan agar proses pembangunan desa memperoleh strategi yang dianggap paling efektif dalam kurun waktu tertentu dan citra pembangunan mampu mengalami transformasi ke arah yang lebih baik (Nain, 2019).

Pada masa orde baru, program pembangunan desa masih dilaksanakan berdasarkan kebijakan vertikal yang dirancang dengan pola *blue print*. Artinya,

hampir semua program pembangunan desa didesain secara seragam bagi seluruh desa di Indonesia (Nain, 2019). Selain itu, terdapat tendensi yang menganggap bahwa desa merupakan suatu komunitas terbelakang, sehingga menyebabkan unsur inisiatif, inovasi dan kreativitas masyarakat desa kurang mendapat ruang dan atensi saat penyelenggaraan pembangunan desa tengah berlangsung. Keadaan tersebut kian diperburuk dengan fenomena sebagian besar pemerintahan desa di wilayah Indonesia masih hanya dijadikan tempat pelaksanaan proyek pemerintah pusat yang terkadang tidak melibatkan kehadiran masyarakat desa dalam proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi terhadap hasil pembangunan yang telah terwujud (Sahdan, 2022).

Kegiatan sosialisasi program pembangunan desa pada masa orde baru juga dilakukan oleh stakeholders melalui pembangunan daerah maupun pembangunan sektoral yang prosedurnya dilaksanakan secara bertahap mulai dari Pusat ke Provinsi, Provinsi ke Kabupaten dan diakhiri dari Kabupaten ke Kecamatan dan Desa. Namun saat era reformasi, posisi

pemerintahan desa sudah berada di bawah UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mengalami transformasi atau perubahan pola landasan dari yang awalnya pemerintahan desa diatur oleh negara atau *state led government*, menjadi pemerintahan desa yang berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat atau *society led government* (Sahdan, 2022).

Undang-undang tentang desa memposisikan pemerintah desa sebagai unit pemerintahan yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan wilayahnya sendiri atau memanfaatkan asas desentralisasi yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Kemudian Undang-undang desa juga menyerahkan otoritas kepada desa untuk merancang program kerja desa berdasarkan hasil dari perencanaan yang telah dirumuskan bersama dalam kegiatan Musyawarah Desa (MUSDES) sesuai dengan empat aspek otoritas desa, yakni: aspek pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta aspek sosial kemasyarakatan desa (Sahdan, 2022). Dalam perjalanannya, transformasi pembangunan desa telah mengalami beberapa perubahan fisik dan pola pikir masyarakat menuju masyarakat modern, bahkan desa sudah mulai menaiki level perkembangan secara global (Nain, 2019).

Adapun definisi dari pembangunan sendiri ialah proses transformasi sosial ke arah yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun tujuan utama pembangunan adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat

(Prasojo & Fauziah, 2015). Bachtiar Effendi mendefinisikan pembangunan sebagai sebuah usaha untuk meningkatkan berbagai macam sumber daya secara berkelanjutan dan terencana dengan prinsip daya guna dan hasil yang merata serta berkeadilan (Effendi, 2014). Selain itu pembangunan juga diartikan sebagai proses perubahan sosial yang bertujuan untuk mencapai kemajuan sosial, baik secara materil maupun secara imateril melalui partisipasi yang luas dari masyarakat (Widodo, 2018).

Dalam sebuah pembangunan, terdapat dua syarat wajib yang harus ada yakni usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak pemerintah, kemudian usaha tersebut harus dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu sendiri dapat tercapai secara maksimal (Maju, 2020). Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan tersebut, disimpulkan bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan suasana kehidupan yang penuh harmonis berdasarkan pedoman pancasila dan UUD 1945 (Maju, 2020).

Keseimbangan antara peran dan posisi pemerintah menjadi salah satu poin yang menentukan capaian kesejahteraan masyarakat secara utuh. Adapun tujuan dari pembangunan dapat tercapai apabila seluruh masyarakat ikut terlibat dalam proses pembangunan di suatu negara (Tjokroamidjojo, 1982) . Masyarakat juga harus mempunyai porsi peran serta posisi yang setara dengan pemerintah dan bukan

hanya dijadikan sebagai objek pembangunan, melainkan bagian yang terlibat dari pembangunan itu sendiri. Masyarakat patut dijadikan sebagai pelaku utama dalam sebuah pembangunan sekaligus penikmat hasil dari pembangunan tersebut. Melalui pembagian peran dan posisi yang seimbang, wujud kesejahteraan masyarakat yang utuh akan mampu tercapai.

Adapun pembangunan yang berbasis desa memiliki arti dan peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional. Hal tersebut dikarenakan desa beserta masyarakatnya merupakan basis dari ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Proses pembangunan desa sejatinya adalah mekanisme dari keinginan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan desa sangat diperlukan pelaksanaannya mengingat separuh dari total keseluruhan rakyat Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Pembangunan desa juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga desa, apabila pembangunan yang dilakukan berorientasi pada kepentingan masyarakat desa itu sendiri (Hagul, 1992).

Proses pembangunan desa mempunyai dua sasaran waktu, yakni sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Adapun sasaran jangka pendeknya dengan mempengaruhi masyarakat untuk segera mengambil tindakan nyata, sedangkan sasaran jangka panjangnya adalah membentuk kepercayaan masyarakat terhadap dirinya sendiri

(Gumilar, 2021). Selanjutnya maksud dari pembangunan infrastruktur di suatu daerah yaitu runtutan pembangunan yang terdiri dari beberapa pembangunan fisik yang saling berkaitan dan saling ketergantungan satu sama lain. Misalnya pada pembangunan salah satu prasarana publik berupa jalan yang memiliki fungsi saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain terhadap beberapa sektor seperti kawasan pemukiman, perdagangan, industri dan wilayah pusat pemerintahan. Oleh sebab itu, setiap kali terjadi pembangunan infrastruktur di suatu daerah, sejatinya diperlukan koordinasi serta sosialisasi secara mendalam antar institusi agar penyelenggaraannya dapat berjalan secara maksimal dan hasil akhirnya berdayaguna tinggi serta berdampak positif bagi masyarakat.

Agar pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang sesuai, maka pembangunan harus dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan mempunyai batas waktu yang jelas serta sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar dan wilayah desa yang bersangkutan. Selain itu, dibutuhkan juga peran aktif masyarakat, perangkat desa beserta lembaga-lembaga sosial yang berada di desa didampingi dengan lembaga resmi di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten (Maju, 2020). Berdasarkan hasil penelitian Agustin et al (2016), menyebutkan bahwa kesuksesan suatu program pembangunan bukan hanya diukur oleh peran dan kemampuan pemerintah setempat, melainkan diikuti dengan keikutsertaan masyarakat dalam

melaksanakan program pembangunan tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Fadil et al (2013), adapun isi dari hasil penelitian ini menerangkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat berdampak pada keberhasilan program pembangunan tersebut. Dan menurut hasil penelitian Imro'atin et al (2015), partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan sangat diperlukan sebab peran dan keikutsertaan masyarakat tersebut akan meningkatkan rasa memiliki dan menghargai kepada setiap proses pembangunan yang ditempuh, khususnya pelaksanaan program pembangunan di desa.

Sebuah pembangunan di suatu daerah pada hakikatnya harus melibatkan kehadiran masyarakat setempat dengan diikuti peran pemerintah dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar pembangunan tersebut dapat dilaksanakan dengan sadar dan antisipatif guna menuju modernitas bina bangsa (*nation building*) (Maju, 2020). Partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi seperti di Indonesia bukanlah hal yang baru. Partisipasi masyarakat dikenal sebagai suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat secara bersama-sama untuk memecahkan berbagai persoalan.

Adisasmita (2006) menerangkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan

bentuk dari pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam aktivitas penyusunan perencanaan dan penerapan program/proyek pembangunan, serta merupakan kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap jalannya program pembangunan (Susetiawan et al., 2018). Masyarakat dianggap sebagai bagian terpenting dari sebuah pembangunan, hal ini disadari dengan percepatan pembangunan yang patut dimulai dari *bottom-up*, yakni dengan mendorong masyarakat agar ikut berperan aktif dalam menggerakkan pembangunan. Oleh karena itu, poin utama dari hasil pembangunan dapat dilihat pada aktifnya keterlibatan masyarakat setempat.

Berikut beberapa uraian mengenai makna dari partisipasi, antara lain: (Yuwono, 2001)

Partisipasi berarti apa yang kita lakukan merupakan bagian dari usaha bersama yang dilaksanakan secara bahu-membahu dengan saudara sebangsa dan setanah air guna membangun masa depan bersama.

Partisipasi juga berarti sebagai suatu upaya untuk mencapai tujuan bersama diantara semua warga negara yang memiliki latar belakang kepercayaan yang beraneka ragam, atau dasar hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan sumbangan demi terciptanya masa depan yang baru bagi bangsa kita.

Partisipasi bukan hanya bagian dari tahap pelaksanaan dan perencanaan

pembangunan saja. Namun juga mencakup sumbangan agar nilai-nilai kemanusiaan dan cita-cita bangsa mengenai keadilan sosial tetap dijunjung tinggi.

Partisipasi dalam hal pembangunan berarti mendorong proses pembangunan ke arah yang sesuai dengan kedudukan manusia, keadilan sosial, keadilan nasional serta yang merawat alam sebagai habitat dan lingkungan hidup juga untuk generasi yang akan datang.

Pentingnya kontribusi masyarakat dalam sebuah pembangunan terletak pada posisi masyarakat yang lebih memahami berbagai permasalahan publik yang tengah terjadi serta skala prioritas pembangunan yang mereka butuhkan seperti pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud dapat berupa sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang ada serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Hal ini kemudian mampu mempermudah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Selain itu, masyarakat sebagai penerima manfaat dari wujud pembangunan juga mampu memberikan gagasan terkait jenis infrastruktur yang harus dibangun. Sebagai contoh, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan hingga tempat tinggal melalui pemanfaatan program pembangunan yang telah sesuai dengan kebutuhan publik.

Selanjutnya untuk mempermudah penyelenggaraan pembangunan di suatu

daerah, Fachrudin Adi (2001) berpendapat bahwa dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut: (Latif et al., 2019)

Tahap Assesment, diawali dengan mengenali sumber daya yang dimiliki dan mengidentifikasi permasalahan yang tengah terjadi. Masyarakat dilibatkan secara aktif untuk melihat permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan pandangan mereka sendiri.

Tahap Pelaksanaan (Implementasi), dengan menjalankan program yang sudah direncanakan sebelumnya dengan baik agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran serta sesuai dengan keadaan di lapangan.

Tahap Alternatif, yakni tahapan yang dilakukan dengan melibatkan warga untuk bisa mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi saat proses pelaksanaan pembangunan berlangsung dengan memikirkan beberapa alternatif program.

Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil), merupakan tahap akhir yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan dari pihak masyarakat maupun petugas terhadap program yang sedang berjalan.

Pencapaian sasaran dalam sebuah pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu harapan besar bagi masyarakat, tentu membutuhkan tingkat keterlibatan masyarakat yang cukup tinggi pada proses pemilihan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Untuk itu, perlu

dilakukan peningkatan kemampuan masyarakat pedesaan, baik secara mental maupun kemajuan pola pikir agar masyarakat dapat ikut andil dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian, wujud dari pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkesinambungan sangat mencerminkan bahwa keikutsertaan masyarakat merupakan poin utama dalam merealisasikan tujuan pembangunan yang sesuai.

Strategi pemerintah desa dalam meningkatkan citra pembangunan desa yang lebih partisipatif dan berkualitas adalah dengan memosisikan diri sebagai dinamisor, di mana pemerintah desa harus memiliki kemampuan dalam memberikan arahan, bimbingan serta mengajak masyarakat untuk bisa berperan aktif pada setiap pembangunan yang dilaksanakan melalui unsur sumber daya, administrasi serta koordinasi. Strategi tersebut diharapkan mampu mengangkat angka partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan (Lailiani, 2016). Selain itu, wujud transformasi pembangunan desa hingga saat ini dapat dilihat melalui perubahan paradigma pembangunan, dari paradigma *production centered development* yang awalnya lebih menekankan pada perubahan-perubahan fisik dan pencapaian kebutuhan dasar tanpa memperhatikan apakah pencapaian tersebut sesuai dengan keinginan masyarakat, sampai paradigma pembangunan yang saat ini sudah berbasis masyarakat (*people oriented development*) yang menuntut

kerjasama dan keseimbangan peran yang baik antara pihak pemerintah, masyarakat, dan swasta (Prasojo & Fauziah, 2015).

Namun pada kenyataannya, proses pembangunan yang melibatkan masyarakat pasti memiliki kendala. Kendala tersebut dapat berasal dari pihak masyarakat sendiri yang dirasa kurang andil dalam kegiatan partisipasi sebab kurangnya sosialisasi terkait wacana pembangunan dari perangkat desa atau kinerja aparatur desa yang terbilang kurang efektif dalam mengkoordinir rencana pembangunan, sehingga pembangunan tidak mampu dilakukan secara merata bahkan hasil pembangunan dapat dikatakan tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Wasistiono dan Irwan Tahir (2006:86-89) berpendapat bahwa faktor penghambat dalam penerapan berbagai program penguatan otonomi desa yang berasal dari kurangnya tingkat partisipasi masyarakat pada proses pembangunan diantaranya: (Rahman, 2016)

Rendahnya kualitas SDM masyarakat desa yang sebagian besar minim berketerampilan dan lamban mengikuti arus globalisasi.

Terbatasnya kelembagaan dan organisasi yang berbasis pada masyarakat.

Kelembagaan di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kemampuan dan kapasitas masyarakat desa dalam hal perencanaan masih minim dan bersifat segmental.

Jika melihat kilas balik ke belakang, upaya yang sudah diusulkan oleh pihak pemerintah dan tertuang dalam Peraturan Menteri Desa No. 19 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa menyebutkan bahwa sebenarnya pemerintahan desa diwajibkan untuk melibatkan peran masyarakat dalam proses pembangunan desa, khususnya pada tahap perencanaan. Oleh sebab itu, terbentuklah kegiatan MUSRENBANGDES atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Sudianing & Ardana, 2022). Akan tetapi, sampai saat ini peran masyarakat dalam kegiatan MUSRENBANGDES belum dapat dilibatkan sepenuhnya dan kegiatan musyawarah tersebut masih tertuju pada kepentingan dalam memenuhi syarat undang-undang semata. Dalam hal ini, masyarakat hanya dijadikan pihak pelengkap dan formalitas dalam kegiatan perencanaan pembangunan.

Terlebih saat masa pandemi Covid-19, pemerintah pusat memberlakukan aturan pembatasan aktivitas sosial yang menyebabkan pertemuan antara pihak desa dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan MUSRENBANGDES dianggap kurang efektif. Selain itu, pengetahuan dan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dinilai masih lemah. Sehingga hal tersebut berdampak pada rencana pembangunan yang tidak merumuskan isu-isu penting yang harus dijadikan prioritas pembangunan. Imbas dari perencanaan pembangunan yang belum mampu dilaksanakan secara partisipatif adalah fungsi dan dayaguna pembangunan belum bisa dinikmati oleh

seluruh lapisan masyarakat.

Sama halnya seperti pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota, partisipasi masyarakat seakan terhambat karena terdapat perbedaan sudut pandang dan pola pikir antara warga pribumi dengan warga pendatang yang sebagian besar menempati perumahan yang berada di Desa Cibusah Kota. Perbedaan sudut pandang terjadi karena warga pribumi merasa keterlibatan peran mereka dalam proses pembangunan infrastruktur desa harus lebih dominan dan aktif pada setiap aspek. Sedangkan masyarakat pendatang dianggap lebih memiliki sedikit hak dan peran untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Padahal, pola pikir yang dimiliki warga pribumi masih terbelah akan perkembangan teknologi, dan terkadang mereka justru menolak pembangunan yang sifatnya lebih modern seperti pengembangan jaringan internet di desa. Perbedaan sudut pandang dan pola pikir tersebut kemudian menimbulkan perpecahan antar warga desa dengan terbelahnya dua kubu masyarakat yang saling bersebrangan dan mengakibatkan proses pembangunan infrastruktur desa sedikit terhambat, walaupun tidak secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang serta penjelasan mengenai kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota, selanjutnya penulis tertarik untuk mengkaji peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur jika dilihat dari teori tahapan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan



(Latif et al., 2019). Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran serta keterlibatan masyarakat desa dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah Kota. (2) Untuk mengetahui peran dan keterlibatan masyarakat desa dalam tahap implementasi (pelaksanaan) pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah Kota. (3) Untuk mengetahui keterlibatan masyarakat desa dalam tahap alternatif sebagai cara untuk menanggulangi hambatan yang terjadi pada proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah Kota. (4) Untuk mengetahui evaluasi apa yang dilakukan masyarakat dan petugas desa terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian kali ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Pemilihan metode kualitatif deskriptif dilakukan karena penulis dapat mendeskripsikan segala fenomena yang terjadi secara jelas serta analisisnya menyesuaikan dengan informasi yang diperoleh dari informan. Penelitian kualitatif berisi pertanyaan dan prosedur berdasarkan fenomena yang telah diamati penulis terhadap peran masyarakat dan aparatur desa dalam hal pembangunan, kemudian dianalisis secara induktif. Penulis memilih Desa Cibarusah Kota sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut memiliki sebuah permasalahan yang sejalan dengan tema yang akan dikaji oleh penulis, yakni pada sektor pembangunan yang melibatkan masyarakat.

Desa Cibarusah Kota merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi beberapa kunjungan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara penulis dengan pihak Desa Cibarusah Kota yaitu tiga kali kunjungan ke desa untuk melakukan observasi awal dan proses wawancara. Ketiga kunjungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2022 hingga 22 Maret 2022. Target atau sasaran yang merupakan subjek dari penelitian ini adalah masyarakat Desa Cibarusah Kota serta perangkat desa setempat.

Selanjutnya data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung oleh penulis di lapangan. Dalam hal ini, penulis memperoleh data primer melalui narasumber langsung yang terlibat dengan pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah Kota. Sedangkan data skunder merupakan data tambahan yang diperoleh melalui media yang sudah ada dan data skunder yang didapat oleh penulis berasal dari arsip laporan pembangunan Desa Cibarusah Kota, terutama laporan hasil kegiatan MUSRENBANGDES tahun 2020 yang lebih fokus membahas tentang rencana pembangunan jalan desa serta jurnal-jurnal digital yang berhubungan dengan tema terkait.

Adapun metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dimulai dari proses observasi lapangan, kemudian dilanjutkan

dengan wawancara secara mendalam kepada narasumber atau informan yang telah dipilih oleh penulis dan diakhiri dengan sesi dokumentasi terhadap kondisi Desa Cibusah Kota. Setelah data terkumpul, penulis selanjutnya menganalisis hasil temuan menggunakan teknik yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, yakni melalui proses reduksi atau pemilihan dan penyederhanaan sajian data yang telah diperoleh. Sesuai dilakukan reduksi data, penulis baru dapat menarik kesimpulan terhadap hasil analisis dan interpretasi data sampai bisa menjawab tujuan penelitian (Hardani, 2020).

Pada tahap penentuan informan, penulis memilih beberapa orang yang dianggap mengetahui informasi yang relevan serta kredibel mengenai partisipasi masyarakat dalam hal pembangunan di Desa Cibusah Kota. Proses penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, agar data yang diperoleh atau didapatkan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan penelitian. Berikut merupakan daftar informan yang telah dipilih penulis melalui berbagai pertimbangan dan dapat dilihat pada tabel 1:

**Tabel 1.** Data Informan Penelitian

No	Nama Informan	Status Informan
1	Iwan Setiawan	Kepala Desa Cibusah Kota Aparatur Desa Cibusah kota
2	Trie Wanto	(Kasie Bidang Pemerintahan)
3	Daan	Masyarakat Desa Cibusah Kota

Sumber: Olahan penulis, 2022

Pemilihan informan tersebut didasari dengan pertimbangan peneliti yang menganggap bahwa kapasitas diri mereka paling mengetahui peran atau keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota. Peneliti memilih Bapak Iwan Setiawan sebagai informan dari pihak perangkat desa karena beliau menjabat sebagai Kepala Desa Cibusah Kota dan tentunya sangat memahami kondisi masyarakatnya dan pembangunan yang ada di Desa Cibusah Kota. Peneliti juga menunjuk Bapak Trie Wanto sebagai informan dari pihak aparat desa karena beliau merupakan salah satu staff di Kantor Desa Cibusah Kota yang berkedudukan sebagai Kasie Pemerintahan. Beliau ditugaskan dalam bidang operasional pemerintahan desa untuk membantu Kepala Desa, untuk itu beliau dirasa mampu menjadi informan pada penelitian kali ini sebab beliau juga mengetahui secara langsung kondisi pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota dan peran serta masyarakat desa dalam sebuah pembangunan. Selanjutnya peneliti juga menetapkan Bapak Daan sebagai narasumber dari pihak masyarakat sebab beliau merupakan masyarakat Desa Cibusah Kota yang ikut andil dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi awal penulis kepada pihak masyarakat dan perangkat Desa Cibusah Kota, terdapat beberapa temuan mengenai peran dan

fungsi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa serta kerja sama yang dilakukan antar masyarakat dengan aparat desa dalam proses pembangunan. Cibarusah Kota merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Adapun luas wilayah Desa Cibarusah Kota sebesar 250ha dengan luas wilayah persawahan sebanyak 6ha dan luas wilayah permukiman sebanyak 244ha. Berdasarkan data penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2021, Desa Cibarusah Kota memiliki jumlah penduduk sebanyak 16.873 jiwa. Dan seiring dengan perkembangan serta pergantian periode perangkat desa, peran masyarakat Desa Cibarusah Kota semakin dilibatkan dalam proses pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan telah dibangunnya sarana dan prasarana umum di desa sebagai wujud dari aspirasi warga desa.

Adapun hasil dari pembangunan infrastruktur desa yang berbentuk fisik yakni akses jalan desa yang sudah baik, fasilitas puskesmas atau klinik yang sudah tersedia di setiap dusun serta Gelanggang Olahraga Desa (GOR) yang baru diselesaikan pembangunannya. Temuan pada penelitian ini selanjutnya diolah menjadi pembahasan terkait keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan berdasarkan empat tahapan pembangunan (Latif et al., 2019), yakni:

#### ***Tahap Assesment (Perencanaan)***

Pada tahap perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibarusah Kota, masyarakat dilibatkan

perannya melalui kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dilakukan di Kantor Kepala Dusun. Dalam kegiatan musyawarah ini, masyarakat dipersilahkan untuk menyuarakan aspirasinya tentang kebutuhan publik yang sedang diperlukan serta menjelaskan permasalahan yang tengah terjadi di desa. Kemudian aspirasi yang telah terkumpul nantinya akan disampaikan kembali oleh para Kepala Dusun pada pertemuan Musyawarah Desa (Musdes). Saat musyawarah desa berlangsung, seluruh aspirasi masyarakat dari beberapa dusun akan dibahas tingkat urgensinya dan Kepala Desa akan memilih beberapa aspirasi tersebut untuk dijadikan rencana pembangunan skala prioritas.

Rencana pembangunan skala prioritas yang telah diwujudkan pembangunannya oleh Kepala Desa pada tahun lalu ialah penambahan fasilitas Puskesmas dan Klinik di setiap dusun dan pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) desa. Walaupun pada tahap assesment ini, terdapat kendala yang terletak pada perbedaan sudut pandang dan pola pikir antara warga pribumi dengan masyarakat pendatang saat penyampaian aspirasi. Namun kendala tersebut dapat diminimalisir dengan kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) yang telah dilakukan. Menurut Kepala Desa Cibarusah Kota, kegiatan musdus sudah berjalan secara efektif karena musyawarah ini dapat menyatukan seluruh aspirasi masyarakat, baik dari pihak pribumi maupun pendatang.

Semua pihak, terutama masyarakat

juga berharap hasil dari pembangunan di desa cibusah kota bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa dan tidak ada satu pun warga yang merasa terabaikan. Dengan demikian, cita-cita leluhur para pendiri bangsa, yakni terciptanya masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera secara merata dapat segera terwujud. Gambar 1. Di bawah menunjukkan salah satu bentuk dokumentasi dari kegiatan musrenbangdes desa cibusah kota yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.



**Gambar 1.** Kegiatan MUSRENBANGDES Desa Cibusah Kota Tahun Anggaran 2020

Sumber: Internal Aparatur Desa Cibusah Kota, 2019

### ***Tahap Pelaksanaan***

Pada tahap ini, program atau kegiatan dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan. Setelah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat skala prioritas dan menyusun rencana pembangunan, selanjutnya masyarakat dilibatkan pada proses pelaksanaan pembangunan. Dalam

tahap pelaksanaan, partisipasi masyarakat dapat berupa sumbangan dana, tenaga, maupun ide-ide untuk proses pembangunan. Biasanya pada tahap pelaksanaan pembangunan ini, tenaga masyarakat yang sangat dibutuhkan dan berperan secara langsung pada proses pembangunan.

Seperti halnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota, sebagian masyarakat desa turun langsung sebagai tenaga kerja untuk menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur seperti perbaikan akses jalan desa, pembangunan fasilitas publik yakni Puskesmas dan GOR desa. Menurut Kepala Desa, tenaga lokal masyarakat memang sangat diperlukan pada pelaksanaan pembangunan sebab selain mengetahui sendiri kondisi daerah yang dibutuhkan pembangunan, peran masyarakat sebagai pekerja proyek juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, khususnya warga pribumi yang memiliki sumber pendapatan bebas dan tidak menentu.

Tentunya hal ini juga mewujudkan tujuan pembangunan yang lain sebagai langkah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi lokal dengan membuat kesejahteraan masyarakat desa sedikit meningkat. Akibatnya, hasil pembangunan yang telah diselesaikan dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat karena mereka ikut terlibat secara langsung pada proses pelaksanaan.

Berikut merupakan salah satu bukti peran perangkat desa yang ikut andil dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota, yakni pembangunan akses jalan. Bukti peran tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. di bawah ini:



**Gambar 2.** Kegiatan Monitoring Pada Proses Pembangunan Akses Jalan Oleh Kepala Desa Cibusah Kota

Sumber: Internal Aparatur Desa Cibusah Kota, 2021

Namun sejak Pandemi Covid-19 mewabah hampir di seluruh daerah di Indonesia, termasuk daerah Cibusah Kota, Kepala Desa menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang berbentuk fisik tidak lagi dilakukan karena seluruh dana pembangunan desa telah dialokasikan untuk dana penanganan darurat Covid-19 di Desa Cibusah Kota. Jadi selama tiga tahun terakhir, pembangunan infrastruktur desa ditiadakan selain penyelesaian GOR desa yang pembangunannya memang sudah berada di tahap akhir.

### *Tahap Alternatif*

Tahap alternatif pada proses

pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota meliputi kegiatan yang melibatkan warga desa agar ikut berpikir mengenai berbagai permasalahan yang mereka hadapi (hambatan) dalam proses pembangunan. Adapun cara mengatasi hambatan tersebut dengan memikirkan beberapa alternatif program. Pada tahap ini, masyarakat mempunyai peran untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi saat proses pembangunan berlangsung. Dan jika hambatan tersebut ditemukan, masyarakat bersama perangkat desa dapat mencari jalan tengah atau solusi agar pembangunan bisa kembali berjalan dengan lancar.

Pada pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota, tahap alternatif ini digunakan warga desa untuk melihat sejauh mana proses pembangunan yang telah dilakukan. Jika pada pelaksanaannya, ternyata pembangunan tidak dilakukan secara maksimal dan tujuan pembangunan tidak dapat diwujudkan dengan baik, maka masyarakat akan melapor ketidaksesuaian tersebut kepada Kepala Dusun. Kemudian Kepala Dusun akan melakukan Musyawarah Desa kembali dengan perangkat dan Kepala Desa untuk membahas laporan mengenai ketidaksesuaian pembangunan tersebut serta usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat desa agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dengan lancar. Namun, sejauh ini masyarakat desa merasa aspirasi mereka selalu diwujudkan dengan baik karena kinerja perangkat desa juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

### **Tahap Evaluasi**

Tahap terakhir ini berupa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan petugas desa terhadap program pembangunan yang sedang berjalan serta hasil yang telah diselesaikan. Evaluasi dapat berbentuk pemantauan, pengawasan dan peninjauan kembali hasil pembangunan dan program yang telah direalisasikan. Adapun kegiatan evaluasi yang dilakukan masyarakat Desa Cibarusah Kota terhadap hasil pembangunan infrastruktur desa, saat ini diwakili oleh LSM dan Ormas yang aktif di Desa Cibarusah Kota. Menurut perangkat desa, terkadang ada beberapa LSM atau Ormas yang secara sengaja berkunjung ke Kantor Desa untuk berdiskusi dengan perangkat desa lainnya mengenai hasil pembangunan yang telah dilakukan dan manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat desa. Aparatur desa beranggapan bahwa bentuk pengawasan memang diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk rencana pembangunan kedepannya.

Gambar 3. di bawah memperlihatkan salah satu dokumentasi kegiatan monitoring yang dilakukan oleh perwakilan perangkat Desa Cibarusah Kota dan perwakilan LSM setempat yang ikut berperan dalam fase pengawasan pembangunan



**Gambar 3.** Kegiatan Monitoring Oleh Perangkat Desa Cibarusah Kota Dan Perwakilan LSM

Sumber: Internal Aparatur Desa Cibarusah Kota, 2022

### **IV. KESIMPULAN**

Proses pembangunan di Indonesia yang mengalami perubahan paradigma dari waktu ke waktu mendorong masyarakat selaku salah satu elemen negara untuk ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai wujud negara yang menjunjung sistem demokrasi. Dalam hal ini, keikutsertaan masyarakat dalam sebuah pembangunan mempunyai nilai penting sebab proses pembangunan tidak akan terwujud tanpa adanya campur tangan masyarakat serta kerja sama dengan pihak pemerintah setempat. Masyarakat sebagai penerima manfaat dari wujud pembangunan itu sendiri tentu tidak ingin dilibatkan perannya hanya sebagai objek pembangunan, tetapi masyarakat patut dijadikan sebagai subjek pembangunan yang ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan guna merealisasikan citra pembangunan yang berkelanjutan dan mensejahterakan masyarakat.

Seperti halnya proses pembangunan infrastruktur di Desa Cibusah Kota yang sebagian besar masyarakatnya sudah dilibatkan perannya pada proses pembangunan infrastruktur desa. Walaupun pada pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti perbedaan sudut pandang dan pola pikir antara warga pribumi dengan masyarakat pendatang saat penyampaian aspirasi guna mewujudkan proses perencanaan pembangunan. Namun kendala tersebut masih mampu diminimalisir dengan kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus) yang telah dilakukan. Selain itu, masyarakat juga turut menyumbang tenaga kerja mereka untuk menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur seperti perbaikan akses jalan desa, pembangunan fasilitas publik yakni Puskesmas dan GOR desa.

Warga desa juga dapat memantau sejauh mana progres pembangunan yang telah dilakukan. Jika pada pelaksanaannya, ternyata pembangunan tidak dilakukan secara maksimal dan tujuan pembangunan tidak dapat diwujudkan dengan baik, maka masyarakat dapat melapor ketidaksesuaian tersebut kepada Kepala Dusun. Dan Kepala Dusun wajib menindaklanjuti laporan tersebut ke Kepala Desa saat pelaksanaan MUSRENBANGDES berlangsung. Namun, sejauh ini masyarakat desa merasa aspirasi mereka selalu diwujudkan dengan baik karena kinerja perangkat desa juga sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Langkah terakhir dari tahap pembangunan yakni kegiatan evaluasi juga dilakukan oleh masyarakat Desa Cibusah

Kota terhadap hasil pembangunan infrastruktur desa yang telah diselesaikan. Meskipun sampai saat ini kegiatan evaluasi masih hanya diwakili oleh LSM dan Ormas setempat yang aktif di Desa Cibusah Kota. Aparatur desa beranggapan bahwa bentuk pengawasan memang diperlukan sebagai bahan evaluasi untuk rencana pembangunan kedepannya. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Cibusah telah melibatkan peran masyarakat, meskipun belum sepenuhnya dan tingkat keberlanjutan perannya masih dalam tahapan yang relatif rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gumilar, G. G. (2021). *Modul praktikum perencanaan pembangunan indonesia*.
- Hardani, dkk. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kualitatif. In *Repository.Uinsu.Ac.Id* (Nomor April).
- Lailiani, B. A. (2016). *Strategi Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa ( Studi pada Desa Kemamang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro )*. 790–798.
- Latif, A., Irwan, Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal MODERAT*, 5(1), 5. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Maju, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 3–15.
- Nain, U. (2019). *Pembangunan Desa dalam*

perspektif Sosiohiistoris. In *Garis Khatulistiwa*.  
<http://eprints.ipdn.ac.id/5500/12/>  
Pembangunan Desa editor Pak Muhammad  
Faisal.pdf

- Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 3(1), 49–64. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v3i1.180>
- Rahman, K. (2016). Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(2), 189–199. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1788>
- Sahdan, G. (2022). Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.218>
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Masa Pandemi Covid19 Di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus*, 14(2), 100–115. <https://doi.org/10.37637/locus.v14i2.1024>
- Susetiawan, S., Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat Dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 109. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>
- Widodo, F. (2018). Evaluasi partisipasi masyarakat pada pembangunan infrastruktur dalam konteks pemberdayaan masyarakat. *JPPM (Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 5(2), 108–121. <https://doi.org/10.21831/jppm.v5i2.15932>